

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2014, India berada di bawah naungan partai Bharatiya Janata sebagai partai yang berkuasa di bawah kepemimpinan Narendra Modi selaku Perdana Menteri hingga saat ini—setelah terpilih kembali di tahun 2019. Perkembangan *Bharatiya Janata Party* (BJP) erat kaitannya dengan ideologi ‘nasionalisme hindu’ yang menjadi panduan utama dari kebijakan-kebijakan politik partai tersebut. Pasca kenaikannya di kursi kekuasaan, BJP seringkali diasosiasikan dengan kasus diskriminasi atau opresi terhadap kelompok minoritas muslim di India, sehingga BJP seringkali dianggap sebagai partai yang membuat sistem politik India berubah menjadi populisme sayap kanan dengan berlindung di bawah kedok ‘nasionalis’ di mana BJP berupaya untuk mengembalikan masa kejayaan Hindu di India.

Sejak mengalami perkembangan yang signifikan, BJP menancapkan akarnya di India dengan merebut hati masyarakat mayoritas Hindu di India dengan cara-cara yang strategis seperti program kesejahteraan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di India serta pemanfaatan isu eksternal seperti skandal korupsi dan komitmen-komitmen lemah dari kongres, namun BJP juga tak jarang diskriminatif terhadap kelompok lain guna mendapatkan dukungan mayoritas Hindu. Populasi India sendiri sangatlah heterogen, dengan Hindu sebesar 79.8% sebagai mayoritas, Islam sebesar 14.2% sebagai agama terbesar kedua di India, Kristen sebanyak 2.3%, Sikh sebanyak 1.7%, Buddha sebanyak 0.7%, dan Jain

sebanyak 0.4% (Registrar General India, 2015).

Contoh tindakan diskriminatif masyarakat India yang terdorong oleh propaganda politik BJP adalah gerakan Ram Mandir yang kemudian menghasilkan Kuil Ram di Ayodhya pada awal tahun 2024. Gerakan ini mendasari penghancuran kerangka Masjid Babri oleh para Karsevaks atau simpatisan Hindu pada 6 Desember 1992 — 12 tahun pasca pembentukan BJP. Karena gerakan tersebut, BJP pun meraih lebih banyak suara hingga menjadikan BJP sebagai partai tunggal terbesar dalam pemilihan Lok Sabha pada tahun 1996 hingga 1999. Namun, BJP mengalami kekalahan dalam pemilihan umum di tahun 2004 dan 2009. Meskipun demikian, di bawah Narendra Modi, BJP kembali bangkit dengan kemenangannya di tahun 2014 dan 2019 – menjadikan BJP sebagai partai terbesar yang paling berkuasa di India saat ini. Kebangkitan BJP di India menandai kebangkitan politik populisme sayap kanan di India. Perubahan dari sistem politik sekuler inklusif menjadi politik eksklusif ditandai dengan meningkatnya politik identitas di India yang dicanangkan oleh pemikiran Hindutva, dimana diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas di India semakin meningkat. Laporan oleh Human Rights Watch mencatat bahwa semenjak Modi berkuasa di tahun 2014, beragam bentuk kekerasan di India semakin berkembang ke tingkat yang mengkhawatirkan.

Pemimpin-pemimpin BJP bahkan secara terang-terangan mendorong masyarakat hindu untuk mengambil tindakan agresif terhadap Muslim. Namun, bukan hanya terhadap Muslim saja, melainkan juga kelompok agama lain, sebab terdapat sebuah gerakan bernama Ghar Wapsi yang dipromosikan saat Natal tahun 2021 oleh para petinggi yang terafiliasi dengan BJP, gerakan ini merupakan gerakan yang mengadvokasi perpindahan agama bagi masyarakat Muslim dan

Kristen di India (Ganguly, 2021). Tidak hanya bentuk diskriminasi sistematis, terdapat pula tindakan diskriminasi ekstrem seperti serangan oleh massa hindu, hukuman mati, dan penghancuran properti berdasarkan narasi dan tuduhan bersama atas pemotongan dan konsumsi daging sapi yang dianggap suci, kecintaan terhadap jihad, dan bentuk praktik keagamaan muslim lainnya (Ashfaq, 2023).

Sebuah kegiatan selama tiga hari bernama Dharam Sansad di tahun 2021 yang diadakan di Haridwar, Uttarakhand menjadi saksi dari berbagai narasi kebencian yang menargetkan muslim, dengan beberapa pidato yang mengarah pada genosida atas muslim juga menjadi salah satu kegiatan diskriminatif yang terafiliasi dengan beberapa anggota BJP (Singh, 2022). Pada bulan Februari 2020, terdapat gelombang kekerasan yang menyebabkan tewasnya lebih dari 40 orang, 200 korban luka-luka, hancurnya properti, hingga pemindahan paksa komunitas yang diakibatkan oleh massa hindu. (Kamdar, 2020). Diskriminasi atas masyarakat muslim juga terlihat saat pandemi COVID-19 dimana terdapat perkembangan narasi bahwa para Muslim merupakan penyebab dari pandemi setelah adanya perkumpulan muslim di Delhi pada Maret 2020 yang berpengaruh pada angka positif COVID-19, hal ini kemudian menjadi dasar pembuatan label “Terorisme Corona’ dan “Kejahatan Taliban” oleh beberapa pemimpin BJP yang kemudian kembali diperparah oleh media massa lokal pro-pemerintah dengan sebutan “Jihad Corona” (Apoorvanand, 2020).

Lebih lanjut, beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Juli tahun 2023, sebuah masjid bernama Anjuman Jama di Gurugram dibakar oleh gerombolan masyarakat Hindu, serangan ini juga menewaskan Maulana Saad, imam di masjid tersebut (Arbab Ali, 2023). Pembakaran masjid tersebut kemudian diiringi oleh

penyerangan-penyerangan lain oleh kelompok Hindu, seperti penghancuran dan pembakaran toko-toko milik Muslim. Terdapat slogan yang dilontarkan saat para gerombolan Hindu ini melakukan penyerangan yakni, “Jai Shri Ram (Puja Dewa Ram)” dan “Jab mulle kaatey jayenge, Ram Ram chillayenge (Muslim akan mati di tangan Dewa Ram)” yang merupakan ‘seruan perang’ kelompok ekstrimis Hindu kanan yang dituduh melakukan pembunuhan orang-orang Muslim karena isu penyelundupan sapi pasca Narendra Modi berkuasa (Arbab Ali, 2023).

Tidak hanya secara domestik, hindu nasionalisme di bawah kekuasaan BJP di India pun turut mempengaruhi kebijakan luar negeri India terhadap negara-negara tetangganya seperti Pakistan, Bangladesh, dan dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, Tiongkok. Terhadap negara-negara tetangga yang bermayoritas muslim, Hindu sayap kanan berusaha untuk menegaskan dominasi Hindu sehingga berperan besar dalam penyebaran narasi anti-Pakistan, anti-muslim, dan anti-minoritas (Falki, 2023). Populisme kanan yang kian berkembang di India kemudian mendorong retorika agresif mengenai Pakistan di bawah kepemimpinan Narendra Modi.

Pemerintah India pun memiliki beberapa kebijakan yang menunjukkan bahwa India berkedudukan superior dibandingkan Pakistan. Salah satu kebijakan asertif India terhadap Pakistan adalah pembatalan status khusus Jammu dan Kashmir, serta serangan militer oleh India di Pakistan. Selain Pakistan, hubungan bilateral India dengan Bangladesh juga menunjukkan sikap agresif oleh India yang dipengaruhi oleh sentimen anti-muslim, terlebih dalam regulasi *Citizenship Amendment Bill* yang mempengaruhi kebijakan pendaftaran kewarganegaraan India secara umum. Kebijakan CAA-NRC adalah kebijakan kontroversial yang memberikan kemudahan bagi imigran non-muslim yang ingin berpindah

kewarganegaraan dari negara-negara tetangga seperti Pakistan, Bangladesh, dan Afganistan ke India. Salah satu penerapan kebijakan diskriminatif ini terjadi di Assam, kota di India yang berbatasan dengan Bangladesh, penerapan CAA-NRC di Assam merupakan alat geopolitik India yang bertujuan untuk mengusir masyarakat muslim di sana dan mendorong mereka untuk bermigrasi ke Bangladesh (Sufian, 2020).

Terhadap Tiongkok di sisi lain, India memiliki sikap defensif khususnya dalam skema sengketa wilayah dan peningkatan kekuasaan Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik yang mengancam kedaulatan India. Hal ini ditunjukkan dengan tren militerisasi India yang meningkat pasca terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India, begitu pula dengan konflik perbatasan dengan Tiongkok yang semakin memburuk. Krisis Galwan di bulan Juni 2020, dimana baik pihak militer India dan Tiongkok mengalami kerusakan fatal akibat konflik perbatasan menandakan awal mula perkembangan konfrontasi terang-terangan antara dua musuh besar di Asia Tenggara sepanjang Line-Actual-Control (LAC) di Ladakh. Semenjak pecahnya konflik yang mengakibatkan korban jiwa tersebut, situasi di daerah perbatasan antar kedua negara tersebut pun menjadi fluktuatif dan tak dapat diprediksi. Ditambah fakta bahwa terdapat sumber mata air dari 1.6 miliar masyarakat India di daerah pegunungan Himalaya yang saat ini juga menjadi salah satu objek sengketa. Hingga saat ini, konfrontasi militer antar kedua negara ini belum menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah resolusi perdamaian yang signifikan, bahkan setelah diadakannya perbincangan diplomatik dan perbincangan antar militer sebanyak 19 kali.

Kebijakan agresif Tiongkok terhadap India baru-baru ini adalah saat Beijing mengeluarkan peta resmi Tiongkok yang mencakup Arunachal Pradesh

dan Aksai Chin sebagai bagian dari Tiongkok di bulan Agustus 2023. Tindakan tersebut kemudian direspon oleh pemerintah India yang secara aktif mengemukakan komentar yang menunjukkan sikap asertif terhadap kebijakan-kebijakan Tiongkok yang dirasa ‘mengancam’ keamanan teritorial India, pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para aktor politik yang terafiliasi dengan BJP diangkat dan dirangkum oleh media-media nasional India seperti Hindustan Times dan Times of India. Beberapa di antaranya adalah pernyataan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri India yakni Arindam Baghci yang menekankan bahwa Arunachal Pradesh akan selamanya menjadi bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari India (Laskar, 2023). Selain Arindam Baghci, Menteri Pertahanan India Rajnath Singh memberikan komentar bahwa India tidak akan tunduk terhadap Tiongkok atas isu diskusi perbatasan dengan Tiongkok di LAC. Kekhawatiran akan tindakan Tiongkok yang kian agresif di sepanjang LAC pun diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri India di *Indian Today Conclave* pada tahun 2023 (Bhattacharya, 2023) dalam merespon kebijakan-kebijakan agresif Tiongkok yang dapat mengganggu integritas wilayah dan kedaulatan India secara keseluruhan.

Di sisi lain, pasca naiknya Narendra Modi ke kursi kekuasaan di tahun 2014, tren skeptisisme masyarakat terhadap Tiongkok terlihat meningkat, survei oleh *Pew Research* (2023) menunjukkan adanya peningkatan ketidakpercayaan dan ketidaksukaan masyarakat India terhadap Tiongkok menjadi 67%, meningkat 21% dari tahun 2019. Selain kekhawatiran India akan sikap Tiongkok di perbatasan wilayah, India juga bersiap untuk menghadapi dominasi pengaruh Tiongkok lewat strategi *Strings of Pearl* di sekitar Indo-Pasifik yang mengelilingi India dengan pangkalan-pangkalan militer dan pelabuhannya. India berusaha

untuk membalas strategi tersebut dengan strategi *Necklace of Diamonds*.

Dari data-data di atas, kemudian penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai perubahan lanskap politik domestik India dalam satu dekade terakhir yang terlihat berjalan beriringan dengan sikap kebijakan luar negerinya, termasuk dalam relasi dengan Tiongkok. Bahwa sejak 2014, di bawah pemerintahan Narendra Modi, dinamika internal India mengalami peningkatan polarisasi identitas dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang terlihat tidak hanya berdampak pada kohesi sosial dalam negeri, namun juga tercermin dalam sikap eksternal India yang semakin tegas dan konfrontatif. Hubungan bilateral India-Tiongkok yang sebelumnya ditandai dengan keseimbangan strategis dan kehati-hatian diplomatik, kini menunjukkan tren yang lebih tegang dan berisiko tinggi, terutama pasca konflik perbatasan, persaingan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik, dan eskalasi narasi saling curiga antara kedua belah negara. Kondisi ini seakan menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri India semakin tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik domestiknya.

Meskipun demikian, keterkaitan antara dinamika domestik dan arah hubungan internasional ini masih belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks India sebagai kekuatan regional yang terus tumbuh. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana perubahan politik domestik India yang ditandai dengan kecenderungan diskriminatif, turut memengaruhi relasi bilateral dengan Tiongkok dalam satu dekade terakhir di bawah kepemimpinan BJP dan Modi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah penulis jabarkan di latar belakang, penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. “Bagaimana narasi ultra-nasional dalam praktik politik domestik populis BJP memengaruhi hubungan bilateral dengan Tiongkok?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana populisme sayap kanan dan nasionalisme etnis India memengaruhi hubungan luar negeri India dengan Tiongkok setelah Narendra Modi dan BJP berkuasa di tahun 2014.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengetahui kaitan antara hegemoni maskulin dengan narasi-narasi ultranasional dalam nasionalisme hindu yang disebarkan oleh BJP melalui strategi populisme sayap kanan yang turut berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri India di bawah kepemimpinan Narendra Modi dan BJP.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman mengenai konektivitas antara maskulinitas dengan hiper-nasionalisme dalam studi gender dan analisis kebijakan luar negeri. Dengan adanya penelitian

ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi pemikiran bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Hubungan Internasional dalam menjadi acuan penelitian selanjutnya yang ingin mengangkat mengenai kaitan maskulinitas dengan hiper-nasionalisme yang dimiliki oleh sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang ‘populis’ seperti India di bawah kekuasaan BJP.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah sebuah negara maupun masyarakat dalam menganalisis sebuah negara yang sedang berkembang menjadi semakin populis, khususnya melalui tanda-tanda seperti adanya penyebaran narasi-narasi maskulin yakni hiper-nasionalisme, fanatisme agama, dan alienasi ‘others’ oleh partai politik tertentu yang dapat mempengaruhi masyarakat dan pembentukan kebijakan domestik oleh pengambil keputusan tertentu.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Studi Literatur

Penelitian oleh penulis tidak akan menjadi penelitian pertama yang akan membahas mengenai kebijakan luar negeri India menggunakan angle gender khususnya maskulinitas India di bawah kekuasaan *Bharatiya Janata Party*, terdapat penelitian sebelumnya oleh Catarina Kinnvall (2019) yang berjudul “*Populism, Ontological Insecurity and Hindutva: Modi and the Masculinization of Indian Politics*” yang juga turut membahas bagaimana BJP di bawah Modi membentuk kembali narasi ‘kebangsaan’, ‘agama’, dan ‘maskulinitas hindu’ dalam praktik politiknya yang juga menunjukkan populisme politik oleh partai

yang berkuasa yakni BJP itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara kegelisahan ontologi dengan politik imajiner dari populisme di India yang hanya menggunakan maskulinitas Modi sebagai contoh narasi imajiner yang dibentuk untuk menutupi kegelisahan ontologi yang dimiliki oleh kelompok populis India. Sehingga, penjelasan mengenai maskulinitas India tidak begitu dibahas secara detail dalam penelitian tersebut, terlebih mengenai kaitannya dengan perubahan hubungan luar negeri India dengan Tiongkok yang lebih asertif di bawah BJP.

Selain itu, terdapat penelitian tesis oleh Arpita Chakraborty (2019) yang berjudul *“Violence, Religion, and Masculinism in Contemporary India: an Analysis of the Writings of Vivekananda, Golwalkar, and Gandhi”* yang mengangkat aspek gender dan filsafat dalam maskulinitas yang tersebar di kehidupan sosial masyarakat kontemporer India yang berkembang melalui tulisan Vivekananda, Golwalkar, dan Gandhi, yang mana Golwalkar merupakan akar dari pemikiran nasionalisme hindu yang maskulin yang dimiliki oleh BJP sebagai partai yang berkuasa di India saat ini. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Chakraborty adalah penulis ingin lebih menggali keterkaitan ide maskulin yang diangkat dan disebarkan oleh BJP secara domestik dapat memengaruhi pemilihan kebijakan India khususnya dalam berhubungan dengan Tiongkok sebagai salah satu negara tetangganya selain Pakistan dan Bangladesh.

Selanjutnya, terdapat penelitian tesis lain yang ditulis oleh Maria Bastos (2021) yang berjudul *“Foreign Policy of Pakistan: a Critical Approach”* yang turut mengangkat aspek gender, khususnya terkait maskulinitas dan hiper-maskulinisme. Dalam penelitiannya Bastos menjelaskan bagaimana Pakistan

memiliki kebijakan luar negeri yang termaskulinisasi, khususnya melalui perkembangan militer dan sikap agresif terhadap India, khususnya para Hindu India. Bahwa terdapat sebuah hubungan antara pertahanan sebuah negara dan maskulinitas, yang erat kaitannya dengan nilai agresif, pemberani, kekuatan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh protagonis maskulin (Pakistan) yang berbanding terbalik dengan kelompok lain yang dianggap lemah, pemalas, irasional, dan ‘gemulai’. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Bastos adalah subjek penelitian, dimana peneliti ingin menganalisis hubungan antara identitas India dan maskulinitasnya dengan kebijakan luar negeri asertif terhadap Tiongkok.

Terakhir, terdapat sebuah penelitian yang ditulis oleh Nik Linders, Stefan Dudink, dan Niels Spierings (2022) yang berjudul “*Masculinity and Sexuality in Populist Radical Right Leadership*”. Penelitian ini menggunakan partai Populist Radical Right (PRR) di Belanda sebagai objek yang diteliti, khususnya terkait hubungannya dengan populisme dan maskulinitas. Dalam penelitian ini, maskulinitas seringkali dikaitkan kepada nativisme yang dimiliki oleh PRR, serta bagaimana maskulinitas dimanfaatkan sebagai sebuah tameng untuk melindungi bangsa dari identitas-identitas dan ideologi asing yang terlalu atau kurang maskulin, guna menggambarkan mereka sebagai kelompok luar dari bangsa dan kebangsaan itu sendiri. Pemikiran tersebut dipupuk dari versi-versi sejarah nasional yang ideal. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Nik Linders et al. adalah penulis ingin lebih menganalisis mengenai maskulinitas dan hubungannya dengan populisme India, serta pengaruh maskulinitas terhadap penggambaran kelompok asing (Tiongkok) sebagai kelompok terluar, dan hubungan antara sejarah nasional India dengan sikap

maskulin yang terbentuk tersebut.

Kajian-kajian terdahulu telah membuktikan bahwa pendekatan gender, khususnya konsep maskulinitas, memiliki relevansi kuat dalam memahami dinamika populisme dan politik identitas di berbagai negara, termasuk India, namun belum secara sistematis digunakan untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri India terhadap Tiongkok. Penelitian Kinnvall (2019) misalnya, menyoroti bagaimana figur Modi sebagai simbol maskulinitas digunakan dalam merespons kegelisahan ontologis masyarakat Hindu, tetapi tidak mengelaborasi dampaknya terhadap perilaku eksternal negara. Chakraborty (2019) juga membahas konstruksi maskulinitas dalam diskursus sosial-politik India melalui tokoh-tokoh historis, namun fokus utamanya berada pada akar intelektual maskulinitas Hindu, bukan pada manifestasinya dalam hubungan internasional kontemporer. Sementara itu, Bastos (2021) menghubungkan maskulinitas dengan kebijakan luar negeri Pakistan dalam konteks militerisme dan agresi terhadap India, memberikan contoh bagaimana gender bisa menjadi lensa penting dalam studi hubungan internasional. Linders et al. (2022) turut menunjukkan bahwa maskulinitas sering digunakan oleh populis kanan-radikal di Eropa sebagai alat politik eksklusif berbasis identitas.

Sehingga, meski keempat studi tersebut menunjukkan relevansi konsep maskulinitas dalam membaca dinamika politik domestik maupun eksternal, belum ada penelitian yang secara langsung menghubungkan narasi maskulin dan populis dalam negeri India dengan pergeseran sikap agresif dan simbolik India terhadap Tiongkok pasca 2014. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjadikan maskulinitas hegemonik sebagai variabel analitis kunci dalam kerangka *Foreign Policy Analysis* (FPA) level domestik, guna

memahami transformasi identitas dan orientasi kebijakan luar negeri India di bawah BJP dan Narendra Modi.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

1.5.2.1. Analisis Kebijakan Luar Negeri

Penulis yang kerap kali berkontribusi dalam pembahasan analisis kebijakan luar negeri adalah Valerie M. Hudson (2007) yang turut menulis buku berjudul *'Foreign Policy Analysis: Classic and Temporary Theories'*. Dalam bukunya tersebut, Hudson menjelaskan mengenai sebuah pendekatan dimana kebijakan luar negeri sebuah negara juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut, bukan hanya oleh faktor eksternal seperti ekonomi atau aliansi strategis. Pendekatan analisis kebijakan luar negeri oleh Hudson menekankan pentingnya memahami struktur sosial, nilai-nilai politik, dan identitas nasional dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Beberapa poin utama dalam analisis kebijakan luar negeri oleh Hudson adalah peran struktur domestik dan identitas nasional negara dalam memengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut.

1.5.2.1.a. Analisis Kebijakan Luar Negeri Level Domestik

Dalam buku *'Foreign Policy Analysis: Classic and Temporary Theories'* Hudson pun kemudian membagi analisis kebijakan luar negeri ke dalam beberapa level analisis yakni individu, kelompok, identitas nasional, politik domestik, dan atribut nasional. Kerangka level analisis yang akan penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah identitas nasional dan politik domestik. Level analisis budaya dan identitas nasional berargumen bahwa persepsi sebuah bangsa atas sekumpulan karakteristik seperti sejarah, tradisi, dan nilai yang dimiliki olehnya (*sense of self*) dapat mendorong sebuah negara untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Hudson menekankan bagaimana identitas nasional berinteraksi dan berhubungan langsung dengan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara, seperti politik domestik, ideologi kepemimpinan, dan persepsi publik.

Hudson berargumen bahwa mitos dan narasi-narasi nasional mengenai masa lalu sebuah bangsa turut memengaruhi pilihan kebijakan luar negerinya. Selain itu, identitas nasional memiliki peran penting dalam bagaimana sebuah negara mempersepsikan ancaman. Di samping itu, tingkat nasionalisme yang dimiliki oleh suatu negara juga mempengaruhi kebijakan luar negeri, baik secara positif maupun negatif, yang dapat berujung pada agresi ataupun konflik (Hudson, et al., 2007). Identitas nasional erat kaitannya dengan politik kultural, karena identitas tersebut bersifat politis dan terbentuk melalui interaksi serta diskursus yang terjadi dalam masyarakat (Hudson, et al., 2007).

1.5.2.2. Nasionalisme

Nasionalisme merupakan ideologi dan gerakan politik yang menekankan hak komunitas tertentu, yang dipahami sebagai “bangsa” untuk menentukan nasib sendiri. Ernest Gellner (1983) dalam bukunya yang berjudul “*Nations and Nationalism*” menekankan bahwa nasionalisme adalah hasil dari kebutuhan masyarakat industri modern akan adanya homogenitas budaya. Sementara itu, Benedict Anderson (1985) memperkenalkan konsep “komunitas imajiner” dalam

tulisannya yang berjudul “*Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*” yang menyoroti bagaimana bangsa dibentuk melalui pengalaman kolektif yang dimediasi oleh bahasa dan media cetak. Menurut Anderson, anggota suatu bangsa membayangkan adanya persaudaraan mendalam secara horizontal, meskipun mereka tidak pernah bertemu satu sama lain.

1.5.2.2.a. Nasionalisme Etnik

Lebih lanjut, penulis seperti Anthony Smith (2004) dalam bukunya yang tulisannya yang “*Nationalism: Theory, Ideology, History*” nasionalisme dapat dipahami sebagai proses pembentukan bangsa, perasaan memiliki terhadap suatu bangsa, bahasa dan simbolisme bangsa, gerakan sosial dan politik atas nama suatu bangsa tertentu, serta sebagai ideologi tentang bangsa. Smith pertama kali memperkenalkan pendekatan etno-simbolis dalam bukunya yang berjudul “*The Origins of Nations: Ethnic and Racial Studies*” pada tahun 1989, dalam bukunya tersebut ia menjelaskan bahwa bangsa-bangsa modern sering membangun dirinya di atas fondasi komunitas etnis lama melalui mitos asal-usul, memori sejarah, dan simbol budaya. Smith juga berkontribusi dalam perbedaan antara nasionalisme sipil dan etnis, dimana Smith menggarisbawahi bahwa nasionalisme etnis mendasarkan legitimasi politik pada kriteria hubungan darah dan warisan budaya. Dengan menghidupkan kembali memori kolektif masa lalu, nasionalisme etnis mendorong narasi identitas nasional yang kuat namun eksklusif.

Komponen kunci dalam nasionalisme etnis oleh Smith adalah kepercayaan bahwa komunitas etnis tertentu memiliki hak historis yang melekat untuk membentuk atau mengklaim negara-bangsa mereka sendiri. Sehingga, identitas dalam nasionalisme etnis cenderung bersifat eksklusif, yang membuat keanggotaannya tidak sekadar pilihan politik, melainkan merupakan warisan

biologis dan budaya yang diturunkan antar generasi (Smith, 1991). Selanjutnya, Smith juga menyoroti bahwa dalam kerangka tersebut, nasionalisme etnis tidak hanya memperkuat solidaritas internal, tetapi juga berpotensi menciptakan mekanisme eksklusi atau pengasingan terhadap kelompok lain yang dianggap “asing”, “*others*”, ataupun non-pribumi.

1.5.2.3. Populisme Sayap Kanan

Dalam buku “*Political Populism: Handbook of Concepts, Questions, and Strategies of Research*” oleh Reinhard Heinisch, Christina Holtz-Bacha, dan Oscar Mazzoleni, dijelaskan bahwa perkembangan populisme berawal dari sebutan tersebut yang mulanya hanya secara eksklusif membahas mengenai fenomena sejarah tanpa membahasnya sebagai sebuah konsep atau menetapkan makna di balik sebutan tersebut. Entri pertama mengenai populisme membahas mengenai gerakan politik di Rusia dan Amerika Serikat pada tahun 1890an, tepatnya mengenai Partai Rakyat. Gerakan politik oleh Partai Rakyat pada dasarnya memiliki fokus terhadap para petani, buruh, dan masyarakat pedesaan, yang mana bertujuan untuk menjawab isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tersebut yang diakibatkan oleh ‘elit’ melalui pembangunan rel kereta dan bank (Heinisch et al., 2021).

Di era modern, tepatnya pada tahun 1990-an, populisme mulai dipandang sebagai ideologi politik yang terpisah daripada sekadar kekuatan reaktif ataupun sebutan untuk fenomena sejarah tertentu. Hal ini didasari oleh kenaikan partai-partai populis sayap kanan di Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Beberapa penulis modern yang membahas mengenai populisme adalah Cas Mudde dan Ernesto Laclau. Mudde terkenal karena gagasan dalam tulisannya yang berjudul “*The Populist Zeitgeist*”, yang menganggap bahwa populisme

bukanlah ideologi yang lengkap atau utuh seperti liberalisme atau konservatisme, melainkan ‘ideologi tipis’ yang dapat melekat pada gerakan politik apapun. Populisme menurut Mudde tidaklah memiliki agenda kebijakan yang menyeluruh, akan tetapi ditandai dengan pembagian antara rakyat dan elit, dimana populisme membagi masyarakat menjadi dua kelompok yang homogen dan antagonistik atau rakyat murni versus elit korup, bahwa politik seharusnya menggambarkan kehendak umum rakyat, namun kehendak tersebut telah dibajak atau diabaikan oleh para elit.

Populisme berdasar pada retorika bahwa rakyat adalah satu, kesatuan rakyat tidak dapat dipertanyakan oleh kompetisi politik partai dan suara rakyat tidak boleh dirusak oleh representasi pluralistik (Muller, 2016). Namun, perlu digaris bawahi bahwa populisme dikategorikan menjadi populisme sayap kanan dan populisme sayap kiri, perbedaan dasarnya terletak pada pendekatan, musuh bersama, dan solusi terhadap isu-isu sosial. Populisme sayap kanan biasanya diasosiasikan dengan konservatisme, nasionalisme, dan politik reaksioner. Sedangkan, populisme sayap kiri menekankan pada keadilan sosial, kesetaraan, dan redistribusi ekonomi. Kemudian, ‘rakyat’ bagi populisme sayap kanan didefinisikan berdasarkan pada kebangsaan, etnis, dan kebudayaan. Sedangkan, populisme sayap kiri memandang ‘rakyat’ berdasarkan pada kelas ekonomi dan sosial, khususnya kelompok marginal dan mereka yang tertindas. Secara retorik, ideologi politik yang dianut oleh populisme sayap kanan mencakup sentimen anti-elit, sikap menentang (oposisi) terhadap pemerintah yang berkuasa, berbicara kepada dan untuk masyarakat luas, dan kebencian yang jelas terhadap apa yang dianggap ‘orang asing’ (Mudde, 2007).

Selanjutnya, berdasarkan buku *“Populist Radical Right Parties in*

Europe”, Cas Mudde berpendapat bahwa populisme adalah ideologi yang tipis (*thin-centered ideology*), dimana populisme tidak dapat berdiri sendiri dan harus selalu menempel pada ideologi-ideologi lain yang lebih komprehensif, seperti nasionalisme. Dalam konteks kanan radikal, Mudde mengidentifikasi bahwa populisme kanan biasanya menggabungkan tiga elemen inti: nativisme, otoritarianisme, dan populisme. Dalam buku tersebut, nativisme diartikan oleh Mudde sebagai bentuk nasionalisme yang sangat eksklusif, yaitu keyakinan bahwa negara seharusnya hanya dihuni oleh anggota kelompok asli (bangsa) dan bahwa unsur-unsur non-pribumi baik kelompok maupun ide, dianggap sebagai ancaman bagi negara-bangsa tersebut. Inti argumen Mudde adalah bahwa populisme sayap kanan bukan hanya sekadar nasionalisme atau sekadar populisme, melainkan gabungan di mana populisme mengadopsi nasionalisme nativis sebagai isinya.

Selain Cas Mudde, tokoh lain dalam pembahasan Populisme adalah Ernesto Laclau (2005) yang mengangkat pembahasan tentang Populisme diskursif dalam tulisannya yang berjudul “*On Populist Reason*”. Dalam pendekatan populisme diskursif yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau, populisme yang dipahami bukanlah sebagai cerminan dari suatu identitas sosial yang telah ada sebelumnya, melainkan sebagai proses pembentukan identitas kolektif “rakyat” yang bertujuan untuk menyatukan kelompok masyarakat yang penuh tuntutan dan frustrasi atas situasi politik, dan pembentukan aktor populis sebagai representasi dari kelompok frustrasi tersebut. Aktor populis tersebut kemudian ditempatkan dalam posisi oposisi melawan sebuah kelompok “*Other*” yang menjadi musuh bersama (Laclau, 2005). Laclau menolak gagasan bahwa “rakyat” adalah entitas esensial yang stabil, sebaliknya, ia memandang populisme

sebagai sebuah praktik politik yang membentuk “rakyat” sebagai subjek politik melalui oposisi simbolik terhadap “*elite*”. Konsep penting dari pendekatan Laclau (2005) adalah konsep “*empty signifier*” atau istilah “penanda kosong”, yang berarti istilah seperti “rakyat” dapat diisi dengan berbagai tuntutan dan makna dari kelompok-kelompok yang berbeda, selama mereka diikat oleh musuh bersama. Dengan demikian, populisme tidak sekadar menyuarakan kepentingan rakyat, tetapi mengonstruksi siapa itu “rakyat” melalui relasi diskursif, menjadikan populisme sebagai strategi hegemonik yang dapat digunakan untuk membangun legitimasi politik, termasuk dalam konteks nasionalisme dan kebijakan luar negeri (Laclau, 2005).

1.5.2.3.a. Populisme Nasionalistik

Dalam membahas konsep populisme nasionalistik, terdapat dua penulis yang berkontribusi dalam konsep ini. Pertama, Benjamin De Cleen (2017) dalam tulisannya yang berjudul “*Distinctions and Articulations: A Discourse Theoretical Framework for the Study of Populism and Nationalism*”, ia menyatakan bahwa populisme dan nasionalisme adalah dua wacana penarik batas atau yang ia sebut sebagai “*boundary-drawing discourses*” yang beroperasi di sumbu yang berbeda namun dapat saling memperkuat. Populisme menciptakan oposisi vertikal antara rakyat dan elit “*people vs. elite*”, sementara nasionalisme mengukuhkan batas horizontal antara anggota bangsa dan orang luar “*us vs. them*”. Lebih lanjut, De Cleen menunjukkan bahwa dalam populisme nasionalistik, rakyat dipahami sebagai entitas nasional yang homogen. Dengan demikian, populisme nasionalistik tidak hanya memobilisasi kemarahan terhadap elit, tetapi juga mengaktifkan identitas nasional eksklusif sebagai dasar legitimasi politik.

Penulis kedua mengenai konsep populisme nasionalistik adalah Rogers Brubaker yang memberikan lensa analitis yang lebih tajam dalam tulisannya yang berjudul “*Why Populism?*” (2017) dan “*Populism and Nationalism*” (2020). Brubaker berpendapat bahwa populisme yang memfokuskan politik sebagai perjuangan moral vertikal antara rakyat dan elit dan nasionalisme yang menciptakan batas horizontal antara “*us*” dan “*them*” saling terjalin dan memperkuat satu sama lain, terutama dalam konteks politik sayap kanan temporer. Brubaker (2017) menambahkan bahwa dalam populisme nasionalistik, elit domestik sering dianggap sebagai pengkhianat bangsa berkolusi dengan kekuatan “asing”. Dengan begitu, populisme nasionalistik bukan hanya menjadi alat kritik terhadap kekuasaan, melainkan juga proyek pertahanan identitas nasional terhadap globalisasi, imigrasi, dan pluralisme budaya. Hal ini menurutnya menjadikan populisme nasionalistik sebagai kekuatan politik yang sangat efektif dalam membangkitkan kecemasan kolektif dan solidaritas etno-nasionalistik.

1.5.2.4. Hegemoni Maskulin

Untuk menjelaskan mengenai hegemoni maskulin, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai maskulinitas itu sendiri. Maskulinitas dijelaskan melalui definisi esensialis dari Robert Connell (2005) dalam tulisannya yang berjudul ‘*Hegemonic Masculinities*’, di mana maskulinitas secara esensial berarti pengadopsian fitur atau nilai-nilai yang menentukan inti dari apa yang dianggap maskulin. Selain esensialis, Connell menawarkan alternatif definisi lain yakni definisi normatif dari maskulinitas, yang memiliki arti penekanan atas ide-ide jantan, denah, dan stereotip-stereotip peran gender yang dianggap maskulin atau jantan. Maskulinitas secara normatif juga terbatas

oleh budaya, sejarah, dan asumsi-asumsi berbasis nilai yang dimiliki oleh sebuah kelompok (Connell 2005, hal. 70). Sedangkan, nilai-nilai kejantanan didefinisikan oleh George Mosse (1997) dalam bukunya yang berjudul *'The Image of Man: the Creation of Modern Masculinity'* sebagai maskulinitas normatif yang mencakup kehormatan, keberanian, sifat kompetitif, kekuatan, harga diri, kemerdekaan, dan merefleksikan idealisme maskulin sebagaimana kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Meskipun menurut Toshiko dan David Gilmore (1992) dalam tulisannya yang berjudul *'Manhood in the Making'* tidak ada standar universal dari apa yang dianggap maskulin, ia berargumen bahwa terdapat kriteria-kriteria yang terdapat dimana-mana yakni untuk menjadi seorang laki-laki, seseorang harus menghamili, melindungi mereka yang berketergantungan, dan menafkahi sanak keluarga, Gilmore menyebut persona global ini sebagai *'Man-the-Impregnator-Protector-Provider'* (Gilmore, 1992).

Kriteria ideal yang telah ditentukan sebagai standar inilah yang kemudian disebut dengan hegemoni maskulin. Hegemoni Maskulin sendiri pada mulanya merupakan sebuah konsep dari studi gender yang dicetuskan oleh seorang ahli Sosiologi yakni R.W. Connell (1988) dalam bukunya yang berjudul *'Gender & Power: Society, the Person, and Sexual Politics'*. Dalam buku tersebut Connell berpendapat bahwa dalam tatanan masyarakat, terdapat hierarki gender atau tatanan gender, dimana hegemoni maskulin menduduki posisi teratas di atas maskulinitas dan femininitas lain yang dianggap lebih inferior (R.W. Connell, 1988). Bentuk maskulinitas yang tersebut memiliki kekuasaan dan kebanggaan terbesar di dalam masyarakat, dimana maskulinitas ini membentuk standar dari apa yang diyakini sebagai 'kejantanan' atau 'jantan'. Hegemoni maskulin dianggap asertif karena menekankan atas kualitas-kualitas yang

dianggap ‘alamiah’ untuk dilakukan oleh seorang ‘laki-laki’ yang maskulin (Morgan, 1990).

Jika dikaitkan dengan studi hubungan internasional, maskulinitas erat kaitannya dengan nasionalisme, khususnya dalam hubungannya dengan institusi-institusi kenegaraan seperti angkatan militer yang secara historis didominasi oleh laki-laki. Oleh karenanya, Mosse beranggapan bahwa budaya dan ideologi dari hegemoni maskulin berjalan beriringan dengan budaya dan ideologi dari nasionalisme hegemonik (Nagel, 1998). Terdapat beberapa aspek dalam hegemoni maskulin, beberapa di antaranya adalah dominasi kekuasaan dan marginalisasi. Dalam buku ‘*Manly States*’ oleh Charlotte Hooper, terdapat pembahasan bahwa sebuah negara dapat dianalisis dari identitas gendernya, bahwa sebuah negara menunjukkan maskulinitasnya melalui aktivitas negara yang ‘jantan’ melalui kebijakan luar negeri dan aksi militernya. Kebijakan luar negeri dan aksi militer sebuah negara kemudian seringkali diasosiasikan dengan ide ‘dominan’, ‘kekuatan’, dan ‘agresi’. Selain itu, menurut Hooper, negara memanfaatkan gambaran serta sikap maskulin untuk menekankan dominasi, mempertahankan kontrol, dan memengaruhi aktor-aktor lain dalam sistem internasional (Charlotte Hooper, 1998). Selain itu memang, nasionalisme juga kerap kali diasosiasikan dengan sikap maskulin, sebagaimana dalam penelitian Joane Nagel (1998) yang berjudul ‘*Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations*’.

Dalam penelitiannya, Nagel mengambil contoh Amerika Serikat, dimana maskulinitas memiliki kaitan erat dengan dua proyek imperialis yakni justifikasi dan advokasi dari ekspansi Barat dan Doktrin Monroe yang menjustifikasi dan menyebarkan pengaruh Amerika ke negara-negara lain, dalam contoh lain,

Presiden Roosevelt menekankan mengenai maskulinitas imperial yang menjelaskan mengenai laki-laki berkulit putih beradab yang pemberani khususnya dalam mengalahkan laki-laki buas inferior berkulit gelap guna menjaga nasionalismenya. Kebajikan-kebajikan yang ditekankan dalam hegemoni maskulin adalah chauvinisme dan nasionalisme militeristik (Nagel, 1998). Studi gender khususnya konsep maskulinitas juga memiliki hubungan dengan nativisme dan populisme, khususnya dalam mengotak-ngotakkan kelompok superior (laki-laki yang memberikan pertolongan) atas para wanita yang harus dilindungi dari laki-laki kelompok lain yang terdemonisasi (*others*) (Mulinari, et al., 2014) Terdapat asosiasi erat antara ideologi maskulin dengan kolonialisme, imperialisme, kehormatan, keberanian, harga diri, militarisme, dan nasionalisme. Penulis lain yang berkontribusi dalam mengaitkan hubungan nasionalisme dengan maskulinitas adalah Cynthia Enloe (2014) melalui bukunya yang berjudul '*Bananas, Beaches, and Bases: Making Feminist Sense in International Politics*' dimana ia menjelaskan bahwa nasionalisme secara umum berkembang dari memori, penghinaan, dan harapan maskulin. Bahwa kemudian, ideologi nasionalistik inilah yang menjadi dasar dari justifikasi atas aksi-aksi nasional yang salah satunya adalah pengasingan dan diskriminasi serta penerimaan atas beberapa kategori dari anggota negara bangsa, serta hubungan dengan negara-negara lain. Justifikasi atas diskriminasi dan pengasingan 'othering' inilah yang kemudian dianggap Hooper sebagai salah satu aspek dari hegemoni maskulin, yakni marginalisasi dan dominasi kekuasaan yang didapatkan setelah mengkerdikan kelompok lain atas dasar kesucian sebuah 'bangsa'.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Operasional

1.6.1.1. Hubungan Konseptual antara Dinamika Politik Domestik dengan Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Analisis kebijakan luar negeri level domestik menekankan pentingnya faktor-faktor internal seperti politik, budaya, dan identitas nasional dalam membentuk perilaku negara. Valerie M. Hudson (2007) berargumen bahwa kebijakan luar negeri bukan sekedar produk dari tekanan sistematis atau kalkulasi rasional semata, melainkan juga tertanam dalam konteks politik domestik, persepsi pemimpin, dinamika institusional, dan narasi identitas kolektif. Dalam hal ini, pemimpin tidak hanya bertindak sebagai aktor rasional yang merespons situasi internasional, tetapi juga sebagai individu yang dibentuk oleh skrip budaya dan keterbatasan politik internal. Dalam konteks India di bawah pemerintahan BJP dan Modi, kerangka ini menjadi sangat relevan untuk melihat bagaimana lanskap politik domestik di India dapat memengaruhi perubahan arah hubungan luar negeri India dengan Tiongkok.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka FPA Hudson level domestik, khususnya dalam mengkaji bagaimana keputusan dan narasi kebijakan luar negeri India sangat ditentukan oleh konfigurasi politik domestik dan narasi identitas nasional. Penulis akan menggunakan argumen Hudson, khususnya unsur-unsur seperti politik domestik, persepsi pemimpin, dinamika institusional, dan narasi identitas kolektif dalam melihat dinamika hubungan luar negeri India dengan Tiongkok.

1.6.1.2. Nasionalisme Hindu

Nasionalisme Hindu merupakan sebuah ideologi yang berkembang di tahun 1920 melalui 'Hindutva' yang bertujuan untuk menciptakan sebuah negara dimana di dalamnya terdapat harmoni antara kekuatan utama budaya di dalam masyarakat India (Hindu) dengan kekuasaan politik (Jaffrelot, 2018). Semangat nasionalisme ini dibalut oleh agenda Hindutva untuk membentuk negara yang mayoritarian, yang merubah India dari 'pseudo-sekular' yang mencakup kebutuhan para masyarakat agama minoritas menjadi 'sekularisme murni' yang merefleksikan kehendak mayoritas. Perkembangan nasionalisme hindu atau Hindutva sendiri pada mulanya diprakarsai oleh Savarkar melalui tulisannya yang berjudul '*Hindutva/Who is a Hindu?*' pada tahun 1923. Hindutva sendiri menyatakan bahwa ke-Hinduan (*Hinduness of a person*) bukanlah sekadar soal agama, melainkan identitas kultural dan etno-nasionalis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Nasionalisme Hindu yang tertanam dalam ideologi Hindutva untuk melakukan kontekstualisasi ultranasionalisme populis di India, dimana mayoritas masyarakat Hindu dan partai BJP yang saat ini memimpin India di bawah Narendra Modi sebelumnya menolak bentuk pemerintahan sekularisme di bawah kepemimpinan Kongres Nasional yang dicetuskan oleh Jawaharlal Nehru dan menginginkan kehadiran '*strong leader*' karismatik, yang dapat membawa suara otentik dari masyarakat biasa (Inglehart, 2016). Sehingga, pada saat kemunculan partai oposisi yang memberikan gagasan baru, yakni BJP bersama dengan RSS, maka masyarakat India mulai merubah sisi berpihaknya kepada BJP dengan semangat nasionalisme hindu yang ditawarkan, terlebih di era setelah 2014 dengan sosok kharismatik yang dicalonkan, yakni Narendra Modi. Selanjutnya, kelompok politik dimana

dalam kasus India adalah BJP yang telah terpilih dan naik ke kursi kekuasaan, seringkali mengasosiasikan kebijakannya dengan narasi ingin mengembalikan masa kejayaan Hindu, yang dikenal juga sebagai ideologi Hindutva. Bahwa, sebagaimana yang dijelaskan Griffin, BJP menggambarkan kelompok Hindu sebagai kelompok yang ‘sah’ sehingga memiliki kedudukan tertinggi di India.

1.6.1.3. Populisme Nasionalistik India di Bawah Modi dan BJP

Dalam penelitian ini, istilah “populisme sayap kanan” digunakan sebagai kategori analitis untuk menggambarkan karakteristik pemerintahan BJP di bawah Narendra Modi. Namun, dalam operasionalisasinya, konsep ini diuraikan melalui lensa populisme nasionalistik, yaitu populisme yang dibentuk oleh narasi eksklusivisme identitas nasional, glorifikasi sejarah dan budaya mayoritas, serta antagonisme terhadap kelompok “*others*” di dalam dan di luar negeri. (Mudde, 2007; Bonikowski, 2017). Karena, bagi Mudde (2007), populisme pada hakikatnya merupakan sebuah ideologi ‘*thin-centered*’ atau ideologi tipis, yang dalam praktiknya sebagai sebuah strategi politik, akan selalu diikuti oleh ideologi lainnya, dalam hal ini adalah nasionalisme. Populisme nasionalistik kemudian dipahami sebagai strategi populisme sayap kanan melalui simbolisme nasionalisme dalam mobilisasi politik, di mana identitas nasional digunakan untuk mengartikulasikan batasan antara “rakyat sejati” dan “*others*”. Mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Brubaker (2017), populisme nasionalistik tidak hanya menekankan antagonisme antara rakyat dan elit, tetapi juga memperkuat dikotomi antara warga bangsa yang dianggap “asli” dengan kelompok “*others*” yang dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan nasional. Dalam konteks India, populisme nasionalistik termanifestasi dalam

upaya Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) untuk mengonsolidasikan identitas Hindu sebagai dasar utama India, serta mendefinisikan loyalitas terhadap negara melalui kesesuaian terhadap nilai-nilai budaya mayoritas.

Populisme nasionalistik yang dibawa oleh Modi dan BJP beroperasi melalui retorika politik yang mengglorifikasi kejayaan masa lalu India, mengkritik kekuatan asing, serta mengidentifikasi minoritas tertentu, terutama umat Muslim sebagai kelompok “*others*” yang mengancam integritas nasional. Melalui kombinasi populisme sayap kanan, nasionalisme etnis, dan strategi populisme nasionalistik, agenda politik Modi dan BJP mendorong pembentukan ultranasionalisme India yang tidak hanya berdampak di ranah domestik, tetapi juga berimplikasi besar terhadap sikap dan perilaku India di arena hubungan luar negeri, khususnya dalam menghadapi Tiongkok. Pendekatan ini secara spesifik akan penulis gunakan dalam melihat bagaimana narasi-narasi nasionalisme Hindu dalam Hindutva, glorifikasi budaya Hindu, dan eksklusivisme identitas nasional di India dianggap sebagai populisme dan implikasinya terhadap mobilisasi massa India untuk mencapai hegemoni politik oleh BJP dan Modi.

Tabel 1.1. Kontekstualisasi Populisme Nasionalistik di India

Populisme Sayap Kanan (Cas Mudde, 2007)	Nasionalisme Etnik (Anthony D. Smith, 2004)	Kontekstualisasi Populisme Nasionalistik India
- Memisahkan masyarakat menjadi “rakyat murni” vs. “elit korup”. - Cenderung melekat pada identitas eksklusif	- Mengutamakan asal-usul bersama, sejarah kolektif, dan simbol budaya sebagai dasar keanggotaan bangsa. - Membentuk identitas nasional berbasis faktor	- BJP menggabungkan retorika populis dan nasionalisme Hindu untuk membangun “rakyat India sejati” - Minoritas dan elit liberal dikonstruksikan sebagai

Populisme Sayap Kanan (Cas Mudde, 2007)	Nasionalisme Etnik (Anthony D. Smith, 2004)	Kontekstualisasi Populisme Nasionalistik India
berbasis etnis, agama, atau budaya. - Menggunakan krisis identitas sebagai alat mobilisasi politik.	objektif (ras, agama, bahasa). - Menekankan warisan historis untuk mendefinisikan legitimasi politik.	ancaman terhadap bangsa - Populisme sayap kanan dipadukan dengan nasionalisme etnis untuk mengukuhkan hegemoni politik

Sumber: Tabel interpretasi diolah oleh penulis (2025) bersumber dari Cas Mudde (2007) dan Anthony D. Smith (2004)

1.6.1.4. Populisme Diskursif dalam Kebijakan Luar Negeri India

Lebih lanjut, penulis juga akan menggunakan kerangka populisme diskursif oleh Ernesto Laclau (2005) dalam penelitian ini. Di mana dalam kerangka diskursif yang diajukan oleh Laclau, populisme dapat dipahami sebagai proses hegemonik di mana identitas kolektif seperti “rakyat” dikonstruksi melalui artikulasi tuntutan-tuntutan sosial yang sebelumnya terfragmentasi dalam satu rantai. Pendekatan populisme diskursif oleh Laclau membantu penulis dalam melihat konteks politik India kontemporer di bawah pemerintahan BJP, di mana Laclau berpendapat bahwa identitas kolektif seperti “rakyat” merupakan “*empty signifier*” yang terbentuk dengan cara diisi oleh berbagai tuntutan-tuntutan yang berbeda selama mereka terikat oleh satu musuh bersama yang dianggap “*Other*”, dan adanya representasi dari sebuah kelompok populis yang mengklaim dirinya sebagai penyelamat dari musuh bersama atau kelompok “*Other*” tersebut (Laclau, 2005). Pendekatan ini juga mengidentifikasi berbagai strategi artikulatif yang digunakan untuk membentuk antagonisme antara “rakyat” dan “elite” serta bagaimana antagonisme ini berinteraksi dengan bentuk antagonisme lain seperti

dikotomi dalam/luar dalam nasionalisme (Wojczewski, 2019). Salah satu strategi yang paling efektif, adalah dengan mengaitkan elit domestik dengan “Other” asing, baik itu negara lain, elit transnasional, pengungsi, maupun lembaga internasional, dan memosisikan mereka sebagai ancaman kolaboratif terhadap kehendak rakyat, kedaulatan nasional, nilai-nilai budaya, kemakmuran, dan identitas kolektif (Laclau, 2005). Strategi ini memungkinkan populisme dan nasionalisme untuk saling menopang secara retorik dalam menciptakan sebuah proyek hegemonik yang bersifat proteksionis dan eksklusif.

Dalam penelitian ini, artikulasi dalam membentuk siapa yang dianggap “rakyat” erat kaitannya dengan wacana nasionalisme Hindu yang disebarkan oleh BJP dan Modi. Pendekatan ini melihat bagaimana retorika politik BJP secara aktif menyematkan elit liberal-sekuler, komunitas Muslim, dan negara-negara lain yang dianggap mengancam kedaulatan India sebagai kekuatan yang ingin melemahkan India Hindu. Pendekatan populisme diskursif akan membantu penulis dalam penelitian ini dalam melihat adanya hubungan antara “elit politik” yang korup dan pengkhianat dengan “musuh luar” dalam satu rantai antagonisme utama yang turut menyatukan rakyat Hindu sebagai subjek politik murni dan sah, atau yang dianggap Laclau (2005) sebagai “rakyat”. Sehingga, pendekatan populisme diskursif oleh Laclau akan penulis gunakan secara spesifik dalam melihat bagaimana BJP dan Modi menginterpretasikan Tiongkok sebagai “Other”, dan bagaimana Hindutva berperan dalam menstrukturkan kebijakan luar negeri dan orientasi geopolitik India melalui narasi nasionalis yang dibingkai dalam oposisi terhadap Tiongkok sebagai aktor asing yang digambarkan sebagai ancaman atas identitas bangsa India.

1.6.1.5. Hegemoni Maskulin dalam Politik Populisme Nasionalistik

Konsep hegemoni maskulin semakin diakui sebagai kekuatan ideologis yang dapat membentuk nasionalisme dan kebijakan luar negeri. Nagel (1998) dan Connell (1995) menjelaskan bahwa maskulinitas hegemonik adalah bentuk ideal dari kelelakian yang dominan secara budaya, yang mengedepankan kekuatan, perlindungan, agresi, dan kehormatan, serta melegitimasi dominasi laki-laki sambil meminggirkan maskulinitas alternatif. Cynthia Enloe (2014) lebih lanjut menyoroti bahwa nasionalisme sering berkembang melalui memori, penghinaan, dan harapan yang maskulin, di mana rasa terhina atau dilecehkan sebagai bangsa dikonstruksikan sebagai bentuk “pelecehan atas kehormatan” yang harus dibalas melalui tindakan agresif dan simbol-simbol kekuatan.

Lebih lanjut, dalam politik populisme, Mulinari (2014) menunjukkan bahwa konstruksi gender digunakan untuk menciptakan dikotomi antara laki-laki yang dianggap “*us*” (pelindung kuat) versus laki-laki yang dianggap “*others*” (ancaman berbahaya). Dalam penelitian ini, penggunaan konsep hegemoni maskulin secara spesifik akan membahas mengenai konsep hegemoni maskulin dalam praktik politik populisme sayap kanan di India. Hegemoni maskulin merujuk pada bentuk dominan dari maskulinitas yang melegitimasi laki-laki (kebanyakan dari kelompok mayoritas kasta atas, dan superior). Dominasi dari kelompok laki-laki tersebut biasanya tercermin dalam ide-ide seperti kekuatan, perlindungan, nasionalisme yang cenderung berlebihan, dan otoritas moral, dan relasi kuasa yang mengalienasi kelompok lain (kelompok minoritas dan *outgroup*) yang dianggap sebagai ancaman dari keutuhan kedaulatan nasional. Konsep tersebut akan diukur melalui kebijakan politik domestik India di bawah kepemimpinan BJP yang kerap mengalienasi kelompok lain, metafora-metafora

maskulin yang disebutkan dalam pidato politik BJP dan Modi, pembahasan yang menghubungkan keamanan nasional dengan kekuatan laki-laki dan kelemahan perempuan. Kemudian, juga melalui indikator lain seperti kebijakan, efek politik, narasi media, dan hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga serta Tiongkok.

1.6.1.6. Pemanfaatan dan Pengontrolan Media Massa oleh BJP

Dalam penelitian ini, pemanfaatan dan pengontrolan media massa dipahami sebagai strategi politik yang integral dalam memperkuat narasi populisme nasionalistik dan mengonsolidasikan kekuasaan populisme sayap kanan di India. Sejalan dengan pendekatan komunikasi politik dalam populisme, para pemimpin populis kerap menggunakan media untuk menciptakan citra kedekatan langsung dengan rakyat, sambil mendelegitimasi sumber informasi alternatif yang dianggap berseberangan (Moffitt, 2013). Di bawah kepemimpinan Modi, BJP secara aktif mengendalikan, mengarahkan, dan mengkooptasi media arus utama untuk menyebarkan narasi nasionalisme Hindu, guna memperkuat dikotomi moral antara rakyat murni India dan kelompok lain sebagai musuh bangsa, serta membangun persepsi krisis terus-menerus.

Strategi pengendalian media ini tidak hanya mencakup dominasi struktural melalui kepemilikan media dan regulasi konten, tetapi juga kampanye-kampanye sistematis untuk mendiskreditkan media independen, mengkriminalisasi jurnalisme kritis, dan memperkuat hegemoni pemerintah Modi melalui laman digital. Hal ini selaras dengan observasi Mudde (2017) bahwa populisme modern kerap bertransformasi menjadi model “*illiberal democracy*” di mana kendali terhadap ruang informasi publik menjadi kunci untuk

mempertahankan legitimasi pemerintah populis. Dalam konteks India, media massa berfungsi dalam memperluas agenda nasionalisme Hindu, menormalisasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas, memuji kebijakan-kebijakan populis BJP dan Modi, serta memperkuat nasionalisme agresif terhadap kekuatan eksternal seperti Tiongkok.

1.6.1.7. Agenda Ultranasionalisme dalam Politik Domestik dan Internasional India

Dalam penelitian ini, istilah ultranasionalisme digunakan sebagai istilah deskriptif untuk menjelaskan kondisi di mana agenda politik mengarah pada glorifikasi identitas nasional secara ekstrem, disertai dengan eksklusi terhadap kelompok minoritas serta pemaknaan bangsa secara sempit dan eksklusif. Pemahaman ini mengacu pada gagasan *palingenetic ultranationalism* yang dikemukakan oleh Roger Griffin (1991), yang menekankan proyek rekonstruksi nasional berbasis mitos kejayaan masa lalu yang “murni.” Selain itu, Hardacre (1989), melalui studi tentang *Shinto Ultranationalism* di Jepang pra-Perang Dunia II menunjukkan bagaimana elemen budaya dan keagamaan dapat dipolitisasi untuk memperkuat supremasi nasional serta mempersempit definisi keanggotaan bangsa. Konsep *palingenetic ultranationalism* dan *Shinto Ultranationalism* tidak akan dijadikan konsep utama, hanya saja dijadikan referensi karena kasus India berbeda secara historis dan kultural. Kedua referensi ini kemudian dapat membantu penulis dalam memperjelas pemahaman tentang penggunaan istilah ultranasionalisme dalam penelitian ini.

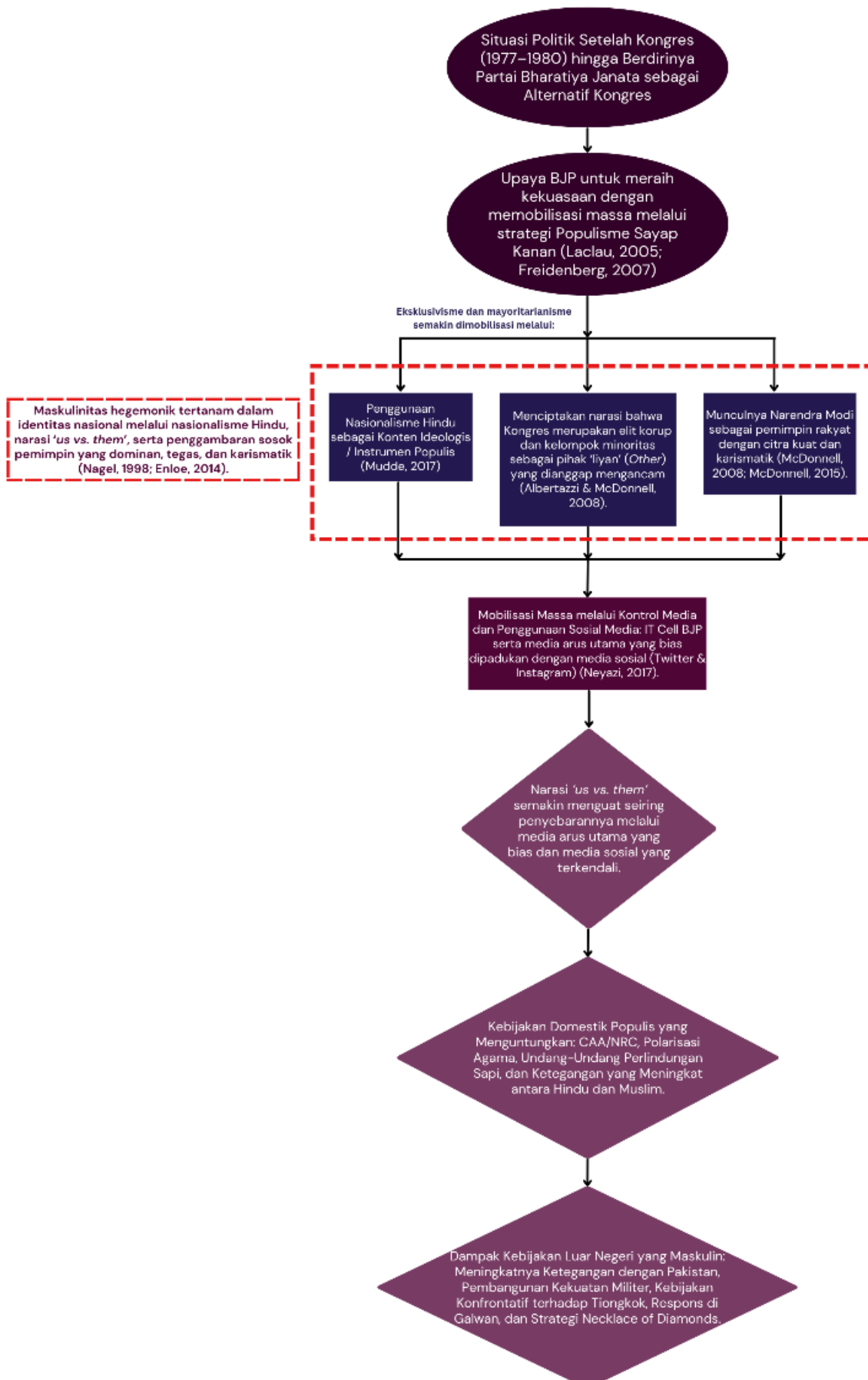
1.8. Argumen Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti berargumen sementara bahwa perubahan arah dalam hubungan bilateral India-Tiongkok, khususnya yang tercermin dalam konflik perbatasan di *Line of Actual Control* (LAC), kawasan Asia Selatan, dan peningkatan rivalitas di kawasan Indo-Pasifik, merupakan manifestasi dari proses maskulinisasi negara yang dibentuk melalui narasi ultranasionalistik dalam lanskap politik domestik yang populis melalui ideologi Hindu Nasionalisme. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri India tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi politik domestik yang menekankan identitas nasional yang kuat, homogen, dan patriarkal dalam narasi-narasi Hindu Nasionalisme. Dengan menggunakan kerangka teori *Foreign Policy Analysis* level domestik oleh Valerie M. Hudson serta beberapa kerangka konsep seperti populisme sayap kanan, nasionalisme, dan maskulinitas hegemonik, peneliti melihat bahwa kebijakan luar negeri India terhadap Tiongkok merupakan ekspresi performatif dari kekuasaan maskulin negara, yang berakar pada kebutuhan untuk mempertahankan kehormatan, kekuasaan, dan kedaulatan dalam bingkai gender yang dominan.

Melalui perspektif tersebut, Tiongkok kemudian direpresentasikan tidak hanya sebagai rival geopolitik, tetapi juga sebagai “lawan simbolik” yang maskulin dalam narasi populisme nasionalistik India yang menekankan kedaulatan dan superioritas peradaban Hindu. Kemudian, Narendra Modi sebagai seorang figur sentral dalam proyek ultranasionalis ini, dikonstruksikan sebagai pemimpin maskulin yang ideal dengan karakteristik kuat, tegas, dan karismatik yang juga menjadi representasi dari kebangkitan India. Ketegangan di wilayah perbatasan seperti di Galwan dan Doklam menjadi ajang pembuktian

maskulinitas negara, di mana tindakan militer, aliansi strategis seperti Quad, dan strategi “*Necklace of Diamonds*” tidak hanya ditujukan untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok secara praktis, tetapi juga untuk memproyeksikan citra kekuasaan maskulin India di kancah global. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kebijakan luar negeri India terhadap Tiongkok sebagai produk dari struktur ideologis domestik yang dipenuhi oleh logika ultranasionalisme populis dan formasi maskulinitas hegemonik.

Gambar 1.1 Alur Berpikir



1.9. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengobservasi dan menjelaskan mengenai sebuah fenomena yang terjadi untuk dianalisis dalam penelitian.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian oleh penulis merupakan metode kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan interpretasi data. Secara definitif, metode kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan dalam menjelaskan fenomena dalam penelitian. Menyimpulkan beberapa ahli penelitian kualitatif, penelitian dengan metode ini merupakan sebuah penelitian yang memiliki fokus untuk menjelaskan berbagai kompleksitas fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial, khususnya memanfaatkan penggambaran data melalui tipe deskriptif yang dibalut secara naratif (Anggito & Setiawan, S.Pd., 2018). Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan sebuah fenomena secara dalam serta sesuai dengan hasil studi lapangan melalui metode kualitatif (Fadli, 2021). Tujuan penggunaan metode kualitatif ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam observasi subjek penelitian dan melakukan analisis dalam secara terperinci.

1.9.2. Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah partai Bharatiya Janata (BJP) dan Narendra Modi selaku Perdana Menteri India, khususnya dalam konteks pembangunan narasi politik domestik yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri India terhadap Tiongkok. Penelitian ini menitikberatkan pada periode pemerintahan Modi sejak tahun 2014 hingga 2024, yang ditandai dengan menguatnya ideologi Hindutva, simbolisasi kepemimpinan maskulin, dan intensifikasi konflik India-Tiongkok pasca insiden Galwan. Subjek dipilih karena

BJP dan Modi menjadi aktor sentral dalam pergeseran arah identitas politik India dan retorika populis nasionalis yang mencerminkan pembingkai identitas dan kekuasaan.

1.9.3. Jenis Data

Data yang akan penulis gunakan adalah data sekunder yakni data yang didapatkan dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel berita dari internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain sumber-sumber tersebut, data sekunder dalam penelitian ini juga berasal dari cuitan atau komentar (*tweet*) pengguna Twitter atau X (Pratiwi, 2025) melalui proses *crawling*. *Crawling* adalah proses menghimpun dan menyalin informasi yang relevan dari *World Wide Web* (Husada et al., 2020). Data yang penulis kumpulkan berupa cuitan dari akun Narendra Modi (@narendramodi), akun resmi partai Bharatiya Janata (BJP4India), dan akun-akun pendukung BJP dan Modi lainnya. Proses *crawling* yang penulis lakukan adalah menggunakan *Apify Twitter Scraper*. Data diambil dari tanggal 28 April hingga 4 Juni 2024, tepat beberapa hari sebelum Lok Sabha 2024 berlangsung. Hasil *crawling* dataset menggunakan Apify kemudian disimpan ke dalam format file csv.

1.9.4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas dua jenis. Pertama, data tekstual yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel berita yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber digunakan untuk menyusun kerangka teori dan memperkuat argumen dalam analisis. Kedua, data digital yang berupa cuitan dari laman media sosial Twitter atau X, yang dikumpulkan dari akun resmi seperti @narendramodi dan @BJP4India, serta dari

akun-akun pendukung Modi dan BJP lainnya. Data Twitter penulis gunakan untuk menganalisis bagaimana narasi-narasi ultranasionalisme dan identitas politik hindu nasionalisme dimobilisasi secara daring melalui sosial media. Sebagaimana dijelaskan oleh Pratiwi (2025), data media sosial dapat digunakan sebagai sumber sekunder dalam penelitian kebijakan dan wacana publik karena bersifat terbuka dan bersumber dari ruang publik digital.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara langsung, sebagaimana yang umum digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Untuk data media sosial, penulis menggunakan metode *crawling* dengan bantuan *Apify Twitter Scraper*, dimana penulis menyalin dan menyimpan informasi relevan dari Twitter secara sistematis, khususnya terhadap akun-akun kunci seperti @narendramodi dan @BJP4India serta akun-akun pendukung Modi dan BJP lainnya yang dapat mendukung penelitian penulis.

Teknik kedua yang akan peneliti fokuskan adalah teknik *desk research* atau penelusuran kepustakaan atau riset pustaka dengan cara mencari data-data yang dibutuhkan untuk penelitian melalui sumber-sumber literatur tertentu seperti jurnal, buku, artikel, maupun situs-situs yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah pelaksanaan wawancara dan riset pustaka, peneliti akan menganalisis dan melakukan interpretasi data yang sesuai untuk digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya guna memudahkan jalannya penelitian.

1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini yang dimulai dengan pertanyaan “bagaimana”, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan dijelaskan secara deduktif. Penjelasan deduktif adalah penjelasan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, juga penjelasan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang cukup kompleks maka data yang diperoleh harus selalu dipastikan kualitasnya. Oleh karenanya, peneliti akan memanfaatkan model analisis dan interpretasi data kualitatif yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Tahapan-tahapan dalam analisis data adalah pertama pemilihan dan pemadatan data yang telah ditemukan, kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut, dan terakhir verifikasi data dan kesimpulan yang telah dibuat (Sarosa, 2021). Tahap tersebut kemudian diperkuat dengan hubungan terhadap konsep-konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Kemudian, untuk data-data Twitter, penulis akan menganalisis dengan cara mengidentifikasi narasi ultranasionalis, simbol-simbol maskulinitas, serta diksi populis yang digunakan dalam cuitan para aktor politik. Proses interpretasi dilakukan dengan menggunakan kerangka konsep populisme sayap kanan, nasionalisme etnis, dan hegemoni maskulin dalam menafsirkan bagaimana narasi digital merefleksikan konstruksi identitas politik dan kebijakan luar negeri India. Dengan membandingkan temuan digital dengan data kontekstual dari literatur dan berita, penulis berupaya untuk memetakan bagaimana populisme sayap kanan India turut membentuk persepsi musuh eksternal yakni Tiongkok dalam praktik kebijakan luar negerinya.